



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SUB UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BACHRUDIN
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 503758

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.412.400.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 580 m2/312 m2 di KOTA MALANG ,
HADIAH Rp. 2.162.400.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 580 m2/312 m2 di KOTA MALANG ,
HADIAH Rp. 2.250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 452.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp.
135.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
167.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 200.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 6.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 5.070.400.000**III. HUTANG** Rp. 100.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 4.970.400.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.